



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DAN PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

Tahun Sidang	: 2020-2021
Masa Reses ke-	: IV (empat)
Sifat Rapat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum
Dengan	: Perkumpulan Pendidik Bahasa Daerah Indonesia
Hari/Tanggal	: Rabu, 31 Maret 2021
Pukul	: 13.00 – Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI (fisik dan virtual menggunakan Zoom)
Pimpinan Rapat	: Agustina Wilujeng Pramestuti, SS, MM/Wk. Ketua Komisi X DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dadang Prayitna, SIP, M.H./Kabagset. Komisi X DPR RI.
Acara	: Audiensi
Hadir Komisi X DPR RI	: 12 orang dari 52 Anggota Panja Komisi X DPR RI.
Hadir	: Encep Ridwan, S.Pd.,M.M.Pd (Ketua Umum Perkumpulan Pendidik Bahasa Daerah Indonesia) beserta pengurus.

I. PENDAHULUAN.

Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 13.05 WIB oleh **Agustina Wilujeng Pramestuti, SS, MM** /Wk. Ketua Komisi X DPR RI, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 281 ayat (1) dan pasal 276 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari **Perkumpulan Pendidik Bahasa Daerah Indonesia** serta menampung pertanyaan, saran dari anggota Komisi X DPR RI.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN.

A. Komisi X DPR RI menyampaikan apresiasi kepada Ketua Perkumpulan Pendidik Bahasa Daerah Indonesia yang telah menyampaikan penjelasan dan masukan yang disampaikan kepada Komisi X DPR RI (*bahan paparan terlampir*). Antara Lain:

1. Membuka formasi PPPK tahun 2021 untuk guru bahasa daerah;

2. Membuka kesempatan untuk mengikuti Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) bagi guru bahasa daerah;
 3. Meminta kagar ada aturan main yang jelas tentang kedudukan mata pelajaran bahasa daerah pada kurikulum nasional agar sejajar dengan guru mata pelajaran yang lain;
 4. Berharap sertifikat pendidikan yang diperoleh guru bahasa daerah di sekolah negeri dapat dijadikan dasar untuk mendapatkan tunjangan;
 5. Sedikitnya jumlah guru bahasa daerah karena di beberapa daerah dalam beberapa tahun tidak ada pengangkatan guru bahasa daerah.
- B. Bahan paparan dan masukan yang disampaikan Perkumpulan Pendidik Bahasa Daerah Indonesia substansinya akan menjadi rujukan pada rapat kerja Komisi X DPR RI dengan pemerintah.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 14.00 WIB

KETUA RAPAT,



Agustina Wilujeng Pramestuti, SS., MM.